

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah pada Bab I dan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab II maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian tambahan penghasilan yang berupa uang makan yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2012, tunjangan atau insentif jabatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan tunjangan Papua kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Biak Numfor yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua, walaupun jumlah tambahan penghasilan yang diberikan tersebut tidak besar dan belum meningkat. Ke depannya diharapkan apabila Pendapatan Asli Daerah yang diterima meningkat maka pendapatan berupa tambahan penghasilan ini pun lebih meningkat sehingga dapat menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Dalam aturan normatifnya belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

2. Standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah karena kalau Pendapatan Asli Daerah turun, anggaran pegawai tetap meningkat setiap tahun, akan tetapi tambahan penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai tetap rendah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terhitung rendah dan tidak selalu meningkat setiap tahunnya menyebabkan standarisasi penggajian pun sangat kecil jumlahnya yang diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Biak Numfor. Ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi yakni, bila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka standarisasi penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak Numfor dapat meningkat dan bila Pendapatan Asli Daerah menurun atau masih saja relatif rendah maka standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak Numfor dapat tetap seperti yang telah ditetapkan atau bahkan menurun. Hal ini tergantung kepada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

B. Saran

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor lebih berupaya lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia yang ada dan lebih mengoptimalkan potensi

pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada jumlah tambahan penghasilan yang diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Dengan demikian diharapkan standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pun mampu menyejahterakan kehidupan para Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor akan menjadi lebih mandiri yang berarti selain mampu memberikan tambahan penghasilan, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor juga mampu membayarkan gaji kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil dan tidak bergantung lagi kepada dana dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anonim, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhanudin A. Tayibnapis, 1986, *Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1987, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumantri D.A., 1998, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, Penerbit IND-HILL-CO.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Nomor 3890.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098.

Keputusan Preesiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Peraturan Kebijakan:

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2012, Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2012 Nomor 10.

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 10.

Website :

<http://alvenrofarelly.blogspot.com>

<http://www.artikata.com>

<http://www.biakkab.go.id>

<http://regional.coremap.or.id>

Artikel:

Power Point berjudul Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan Daly Erni, sumber materi: Wukir Ragil dan Tri Hayati (<http://www.wordpress.com>)

Naskah Non Publikasi:

Dokumentasi Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011